

# Jurnal Otonomi Keuangan Daerah

*Jurnal Otonomi Keuangan Daerah* adalah wadah informasi bidang Keuangan Daerah berupa hasil penelitian, studi kepustakaan, maupun tulisan ilmiah terkait. Pertama terbit pada 2013 dengan frekuensi terbit dua kali setahun: Juni dan Desember

## **SUSUNAN KEPENGURUSAN**

### **PEMBINA**

Prof. Dr. Ermaya Suradinata, SH, MH, MS

### **PENASIHAT**

Prof. Dr. H. Khasan Effendy, M.Pd  
Dr. Bambang Supriyadi, BE, M.Si

### **PENANGGUNG JAWAB**

Dr. Rosmery Elsy, SH, M.Si

### **PIMPINAN REDAKSI**

H. Basuki Rahmat, SE, MM

### **SEKRETARIS**

Umuh Muchidin, SE, MM  
Ira Meiyenti, S. IP

### **MITRA BESTARI/NARASUMBER**

Prof. Dr. H. M. Aries Djaenuri, MA (IPDN)  
Dr. Udaya Madjid, M.Pd (IPDN)  
Dr. R. Rina Novianty A, SE, MS (Unpad)

### **TIM REDAKSI**

Dra. Sri Endah Setjani B., MM  
Fanderson K., A. Ka  
Ika Agustina, SE, M.Si

### **STAF REDAKSI**

Ipong Ramnasih, S. Sos  
Herman Karim, S. Sos  
Sarju

**STAF DISTRIBUSI**

Saefulloh, S.Pd.I  
Onah  
Muhamad Sodik, S.Sos  
Udin, SE

**BENDAHARA**

Ismail, S.Pd.I  
Nendah Diani Komalawati, S. Sos  
Sugimah

**ALAMAT REDAKSI/PENERBIT**

Program Studi Keuangan Daerah  
Fakultas Manajemen Pemerintahan-Institut Pemerintahan Dalam Negeri  
Jalan Raya Jatinangor Km. 20  
Telp. (022) 7798252-7798253 Fax. (022) 7798256  
Jatinangor-Sumedang 45363

***Designed & Printed by:***  
alqaprint@yahoo.co.id  
*Isi di luar tanggung jawab percetakan*

## PENGANTAR REDAKSI

**J**URNAL *OTONOMI KEUANGAN DAERAH* ISSN 2355-0880 yang kini ada di tangan pembaca merupakan upaya Program Studi Keuangan Daerah Fakultas Manajemen Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) turut serta memberikan kontribusi ilmiah terhadap teori atau penerapan ilmu bidang keuangan daerah yang dari hari ke hari semakin dinamis sesuai dengan perkembangan keuangan dan perekonomian pada era global saat ini, baik di tingkat lokal (daerah), nasional, regional, maupun internasional.

Hal di atas sejalan dengan visi Prodi Keuangan Daerah FMP IPDN sebagai penghasil pamong praja muda yang paham dan dapat mengelola keuangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat, berakhlak mulia, profesional, dan menjadi pemersatu bangsa. Misi yang diemban antara lain terwujudnya pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat), terwujudnya pamong praja muda yang memiliki budaya akademik dan budaya pemerintahan yang baik.

Jurnal Otonomi Keuangan Daerah **Vol. 6, No. 2/Desember 2018** ini menyajikan lima karya tulis, yakni tentang Implementasi sistem *electronic budgeting* ditulis bersama oleh Rosmery Elsy & Reven Arisandi, kemudian implementasi keberadaan pasar tumpah mingguan bagi peningkatan pendapatan masyarakat oleh Riswati. Tulisan berikutnya tentang implementasi sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual oleh Ira Meiyenti, lalu pengaruh realisasi penyerapan anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah oleh Umuh Muchidin & Eko Budi Lestari. Tulisan terakhir merupakan hasil studi kepustakaan, mengenai optimalisasi pajak dan retribusi daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah ditulis Hj. Sri Endah Setijani Budilestari.

Kami yakin, kehadiran *Jurnal Otonomi Keuangan Daerah* ini dapat memperkaya khazanah keilmuan yang sangat bermanfaat, tidak saja bagi praja (mahasiswa), dosen (peneliti), namun juga bagi pemerintah baik daerah maupun pusat, yang pada gilirannya-oleh karena merupakan hasil penelitian nyata di lapangan-dapat menjadi alternatif dan rujukan yang implementatif.

Semoga!

*Redaksi,*

# Jurnal Otonomi Keuangan Daerah

## DAFTAR ISI

<b>Pengantar Redaksi</b> .....	iii
<b>Daftar Isi</b> .....	iv

### **ROSMERY ELSYE & REVEN ARISANDI**

IMPLEMENTASI SISTEM <i>ELECTRONIC BUDGETING</i> DI KELURAHAN KRENDANG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PROVINSI DKI JAKARTA ..	101 - 117
---	-----------

### **RISWATI**

IMPLEMENTASI KEBERADAAN PASAR TUMPAH MINGGUAN BAGI PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI SEKITARNYA: STUDI KASUS DI DEPAN KAWASAN PT KAHATEX SUMEDANG/BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT .....	119 - 131
---	-----------

### **IRA MEIYENTI**

IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL DI KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT .....	133 - 157
---	-----------

### **UMUH MUCHIDIN & EKO BUDI LESTARI**

PENGARUH REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN SUBANG PROVINSI JAWA BARAT .....	159 - 178
---	-----------

### **HJ. SRI ENDAH SETIJANI BUDILESTARI**

OPTIMALISASI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH .....	179 - 194
--	-----------

### **Indeks**

### **Pedoman Penulisan Naskah**

# IMPLEMENTASI SISTEM *ELECTRONIC BUDGETING* DI KELURAHAN KRENDANG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PROVINSI DKI JAKARTA

Oleh

**ROSMERY ELSYE & REVEN ARISANDI**

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

## **ABSTRACT**

*Indonesian nation has now entered the era of reform that is required to address the changes that occurred one of which is the Government. The new paradigm of government is to implement regional autonomy where the local government has the authority to regulate the area included in the financial management. By developments in information technology today demand financial management by using the computer as a database management. The central government made a financial program that is online is Electronic Budgeting. This is done to realize the local financial management are transparent and accountable.*

*According to explanation above, the writer focused on "Implementation of Electronic Budgeting System at Krendang urban village West Jakarta City of Administration DKI Jakarta Province". This study aims to determine how the application Electronic Budgeting at Krendang urban village West Jakarta City of Administration DKI Jakarta Province, the factor which delayed the application Electronic Budgeting, and then the effort to overcome the obstacles Krendang Urban Village in application Electronic Budgeting.*

*In this research, the writer applied explorative design by using qualitative approach. He collected the data through interviewed a half of main instruments and documentation. The technique of analysis data used by the writer was reduction data, presentation, conclusion, display and verification.*

*The results of this study indicate that the of implementation Electronic Budgeting in Krendang Urban Village has been going effective, it can be proven with the data budget realization village. In the implementation there are some problems such as human resources, internet service low connection, and the catalogue is incomplete. While the efforts of the village Krendang to overcome this is through education and more intensive training, good coordination and planting awareness to work effectively and efficiently.*

**Keywords:** *electronic budgeting, implementation, system*

## **PENDAHULUAN**

Era globalisasi telah diartikan sebagai Era perubahan zaman yang seluruhnya didukung oleh perkembangan teknologi yang semakin canggih. Segala informasi dapat dengan mudah didapatkan, begitu pula dengan pola berfikir masyarakat Indonesia yang semakin kritis membuat

rasa ingin tahu yang semakin tinggi terutama dalam haknya sebagai warga negara. Hal ini mendorong masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memenuhi tugas dan kewajibannya yang pada umumnya untuk menciptakan kesejahteraan masyarakatnya.

Perkembangan kehidupan manusia pada era globalisasi telah membawa masyarakat ke dunia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi informasi yang kini semakin berkembang dengan pesat di mana masyarakat juga harus mengerti mengenai teknologi informasi. Teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari memberikan suatu kemudahan dalam menjalankan kegiatan khususnya dalam menjalani urusan pemerintahan. Pemerintah daerah memiliki tugas untuk mengembangkan serta memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintah dengan menciptakan suatu system pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*.

Pada 2010, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah mulai menggunakan program pengelolaan keuangan daerah secara online yaitu SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) dengan harapan dapat menciptakan tertib administrasi anggaran daerah. Namun, pada implementasinya SIPKD pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya mendapat nilai opini wajar dengan pengecualian (WDP) oleh BPK, kemudian pada 2011 dan 2012 mengalami peningkatan dari opini BPK tentang penyajian laporan keuangannya yaitu berupa wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan (WTP-DPP).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak pernah lelah mengevaluasi diri sebagai usaha menjawab tantangan dari kemajuan teknologi informasi di era globalisasi ini. Dalam upaya memaksimal proses Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah serta tertibnya administrasi anggaran daerah maka, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan Sistem *Electronic*

*Budgeting*. Pengembangan pengelolaan keuangan menjadi Sistem *Electronic Budgeting* kemudian mulai diterapkan dalam penyusunan rancangan APBD 2014 yang di mana hal tersebut didasari dengan Peraturan Gubernur Nomor 145 Tahun 2013 tentang Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Melalui *Electronic Budgeting*.

Pelaksanaan Sistem *Electronic Budgeting* ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat, pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat bagi masyarakat. Sistem *Electronic Budgeting* itusendiri dapat diartikan sebagai sebuah sistem informasi untuk penyusunan anggaran dengan menggunakan media elektronik. Pada awalnya Sistem *Electronic Budgeting* ini hanya berupa *spreadsheet*, kemudian dikembangkan hingga berbasis internet. Termasuk dalam Sistem *Electronic Budgeting* adalah sebuah kebutuhan data dan proses yang diperlukan hingga menampilkan laporan-laporan Analisis anggaran.

Keterbukaan informasi yang akurat dan akuntabel merupakan aspek yang menjadi tuntutan dari masyarakat pada era globalisasi saat ini. Pelaksanaan Sistem *Electronic Budgeting* tidak lepas dari sistem informasi karena dalam pelaksanaannya menggunakan sistem teknologi dan informasi yang maju. Sistem *Electronic Budgeting* dipercaya dapat lebih menghemat anggaran serta menciptakan tertib administrasi dalam pengelolaan anggaran. Pada sistem ini, anggaran yang telah dimasukkan dalam program kegiatan

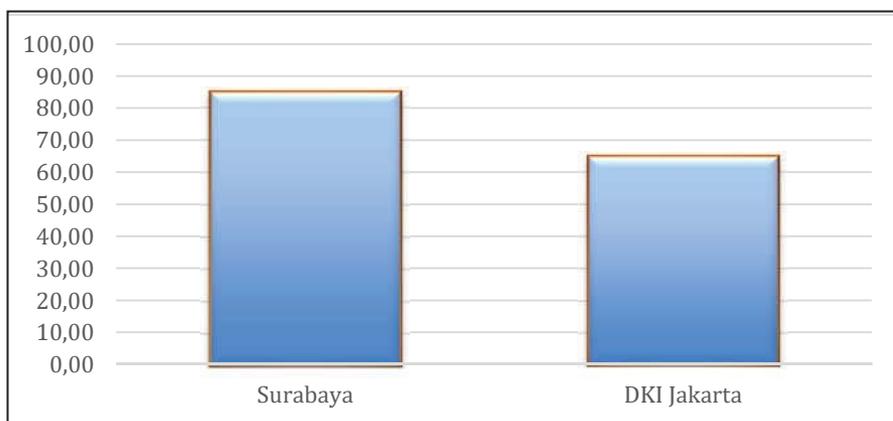
dan telah disetujui oleh Gubernur dapat langsung dikunci agar tidak ada lagi kegiatan siluman atau dana gelap yang dapat menyebabkan tindak korupsi. Selain itu pelaksanaan Sistem *Electronic Budgeting* ini diharapkan dapat menciptakan tertib administrasi penganggaran yang ada dalam pemerintah daerah dan SKPD yang ada di dalam pemerintah daerah.

Pelaksanaan Sistem *Electronic Budgeting* pertama kali di terapkan oleh pemerintah Kota Surabaya pada 2004 yang kemudian di ikuti oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam penerapan sistem *Electronic Budgeting*, Kota Surabaya tentu lebih pengalaman dalam pelaksanaan sistem tersebut. Pelaksanaan Sistem *Electronic Budgeting* di Kota Surabaya telah berjalan dengan baik dengan baik dengan upa menghilangkan kegiatan atau dana siluman pada APBD Kota Surabaya, selain itu pada kota Surabaya pelaksanaan Sistem *Electronic Budgeting* dapat mengunci anggaran sehingga selain walikota dan kepala dinas terkait tidak dapat membuka dan mengubah anggaran yang sudah

dientry, selain itu dana yang dientry tidak dapat dimanipulasi kembali. Melihat perkembangan pengelolaan keuangan daerah di Kota Surabaya, maka Provinsi DKI Jakarta turut ikut mencontoh pelaksanaan Sistem *Electronic Budgeting* dengan harapan dapat mempermudah pengelolaan keuangan serta data menghilangkan penyimpangan anggaran yang terdapat di Provinsi DKI Jakarta.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Provinsi DKI Jakarta mulai dari Dinas sampai dengan tingkat Kelurahan sudah menerapkan sistem ini untuk mempermudah pengelolaan keuangan tersebut. Keberanian dan kemampuan pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak lepas dari proses pelaksanaan *Electronic Budgeting* dalam menerapkan salah satu bentuk dari *E-government* yang sudah berjalan dalam ruang lingkup penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan gambar 1 di atas dapat dilihat bahwa pelaksanaan Sistem *Electronic Budgeting* sudah berjalan baik namun dalam evaluasi Bappeda DKI jakarta



**Gambar 1**

Persentase Perbandingan Pelaksanaan Sistem *Electronic Budgeting* antara Kota Surabaya dengan DKI Jakarta

**Sumber:** Evaluasi Implementasi *Electronic Budgeting* Bappeda

bila dibandingkan dengan Kota Surabaya masih banyak terdapat kekurangan. Kondisi pelaksanaan Sistem *Electronic Budgeting* di Provinsi DKI Jakarta sekarang ini masih belum dapat diterapkan dengan penuh sesuai dengan harapan dan efektif dikarenakan Sistem *Electronic Budgeting* tersebut merupakan program baru khususnya bagi Provinsi DKI Jakarta yang masih perlu melakukan perbaikan dalam kinerja pelaksanaan Sistem *Electronic Budgeting*. Dari Kekurangan tersebut pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih terus berupaya memperbaiki semua masalah-masalah yang ada agar proses Sistem *Electronic Budgeting* dapat berjalan lebih baik dan efektif. Sebagai contoh masalah-masalah dalam penyediaan fasilitas yang diperlukan untuk memadai pelaksanaan sistem *Electronic Budgeting*, fasilitas-fasilitas itu dapat berbentuk *software* atau jaringan internet yang diperlukan dalam pelaksanaan sistem *Electronic Budgeting*. Selain itu masih ada juga para operator-operator atau sumber daya manusia (SDM) yang belum maksimal dalam tata cara pelaksanaan Sistem *Electronic Budgeting* ini.

**Tabel 1**

Tabel Persentase Metode Entry Data Anggaran

Tahun	Manual	<i>E-Budgeting</i>	Total
2014	58%	42%	100%
2015	55%	45%	100%

**Sumber:** Evaluasi Implementasi *Electronic Budgeting* Bappeda

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa belum seluruh data anggaran telah dientry dengan Sistem *Electronic Budgeting*, metode penginputan data anggaran dengan Sistem *Electronic Budgeting* masih di bawah persentase metode penginputan data secara manual dikarenakan masih kurangnya

operator-operator yang berkompeten dalam melaksanakan Sistem *Electronic Budgeting* secara efektif. Pengentrian data secara manual juga di sebabkan karena masih kurang baiknya jaringan internet atau jaringan server yang menyebabkan terjadinya banyak gangguan sehingga pengentrian data anggaran tidak dilakukan dengan sistem *Electronic Budgeting*.

Permasalahan selanjutnya mengenai *software* (perangka lunak) atau teknologi Sistem *Electronic Budgeting* yang masih sering mengalami gangguan dan tingkat kematangan *website* yang masih kurang memadai. Hal ini menyebabkan para pegawai atau operator kesulitan dalam melakukan penentrian data apabila Sistem *Electronic Budgeting* masih sering mengalami gangguan atau *crash*. Masalah dalam *software* (perangkat lunak) tersebut yang akhirnya membuat para pegawai atau operator mengimout data dalam bentuk manual.

Pemerintah seharusnya mempersiapkan fasilitas seperti memperbaiki jaringan internet, memperbaiki sistem-sistem dalam perangkat lunak agar tidak terjadi gangguan dalam pelaksanaan penggunaan Sistem *Electronic Budgeting*, melaksanakan sosialisasi ataupun melaksanakan pelatihan terhadap para pegawai atau operator dan juga memperbanyak modul untuk mengoptimalkan kemampuan pegawai dalam melaksanakan Sistem *Electronic Budgeting*. Hal ini tentunya dapat mengurangi jumlah data yang di input secara manual sehingga dapat mengefektifkan pelaksanaan Sistem *Electronic Budgeting* dan dapat menciptakan tertib administrasi anggaran di Provinsi DKI Jakarta.

## Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pelaksanaan Sistem *Electronic Budgeting* di Kelurahan Krendang Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta.
2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan Sistem *Electronic Budgeting* di Kelurahan Krendang Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta.
3. Upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengatasi kendala-kendala di dalam implementasi Sistem *Electronic Budgeting* khususnya di Kelurahan Krendang Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta.

## Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui tentang pelaksanaan Sistem *Electronic Budgeting* di Kelurahan Krendang Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta.
2. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Sistem *Electronic Budgeting* di Kelurahan Krendang Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta.
3. Mengetahui upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menghadapi masalah dalam penerapan Sistem *Electronic Budgeting* di pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

## TINJAUAN TEORETIS

### Konsep Implementasi

Model implementasi yang dikemukakan oleh Edward III bahwasanya keberhasilan dari suatu kebijakan dalam rangka

implementasinya yaitu ditentukan oleh beberapa faktor penting yaitu komunikasi (*communication*), sumber daya (*resource*), sikap implementator (*disposition*), struktur kebijakan birokrasi (*bureaucratic structure*), dan kebijakan atas-bawah (*top-down*).

Menurut pandangan Edward III yang dikutip dalam buku Budi Winarmo 2008 menjelaskan proses komunikasi kebijakan dipengaruhi tiga hal penting yaitu:

1. Faktor pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah transmisi. Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan.
2. Faktor kedua adalah kejelasan, jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Seringkali instruksi-intruksi yang diteruskan kepada pelaksana kabur dan tidak menetapkan kapan dan bagaimana suatu program dilaksanakan.
3. Faktor ketiga adalah konsistensi, jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada pelaksana kebijakan jelas, tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik.

## Konsep Sistem

Sistem dan prosedur merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Suatu sistem baru bisa terbentuk bila di dalamnya terdapat beberapa prosedur yang mengikutinya. Menurut (Mulyadi, 2010: 5) dalam bukunya yang berjudul *Sistem Akuntansi* menyatakan bahwa:

Sistem adalah jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan sedangkan prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang.

Dari Pengertian di atas dapat ditarik simpulan bahwa sistem merupakan bagian-bagian atau sub sistem-sub sistem yang kumpulan menjadi satu dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya yang kemudian dirancang untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

## Konsep *Electronic Budgetting*

Menurut Harry Surharman (2006: 76) pengertian anggaran atau *budget* adalah sebagai berikut.

Pada dasarnya anggaran merupakan alat yang dipergunakan dalam suatu organisasi perusahaan atau bisnis untuk mengungkapkan rencana kegiatan dalam satuan kuantitatif, kordinasi, dan implementasi serta mengendalikan kegiatan operasional maupun menilai kinerja manajerial dalam suatu organisasi.

Berdasarkan data di atas, *Electronic Budget* mempunyai empat unsur pokok yaitu:

1. Rencana, yaitu suatu penentuan terlebih dahulu atau penentuan di muka, tentang suatu aktivitas atau kegiatan yang akan dilakukan di waktu yang akan datang.
2. Meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yaitu mencakup semua kegiatan yang dilakukan yang dilakukan oleh semua bagian yang ada di dalam perusahaan.
3. Dinyatakan dalam satuan keuangan, yaitu satuan yang dapat dengan mudah diterapkan pada berbagai kegiatan perusahaan yang beraneka ragam.
4. Berlaku untuk jangka waktu tertentu yang akan datang, yaitu bahwa budget berlaku untuk masa yang akan datang, dengan batas waktu tertentu.

## Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan cara-cara berikut ini:

1. Metode wawancara

Metode pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report* atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Peneliti kemudian melanjutkan dengan mengadakan wawancara tidak terstruktur yang juga diperkuat.

2. Observasi

Dalam penelitian ini, observasi yang digunakan adalah observasi tak berstruktur dan yang menjadi fokus observasi adalah pelaksanaan Sistem *Electronic Budgetting* ditinjau dari sumber daya aparatur yang mendukung, dukungan sarana dan prasarana, hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaan pengelolaan dengan Sistem *Electronic*

*Budgeting* serta upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah kelurahan dalam menanggulangi hambatan-hambatan tersebut.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi di sini merupakan kegiatan untuk melengkapi informasi dan data yang diperoleh melalui buku-buku, arsip, dan laporan yang diperoleh di tempat dilaksanakannya kegiatan penelitian. Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan, artefak, dan foto.

## Teknik Analisis Data

Aktivitas Miles dan Huberman (1984) menerangkan dalam Satori dan Komariah (2014: 218-220) terdiri atas: data *reduction* (reduksi data), data *display* (penyajian data), dan *conclusion drawing/verification* yang dilakukan terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya mencapai jenuh.

### 1. Data Reduction (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

### 2. Data Display (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.

### 3. Conclusion Drawing/verification

Simpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

## PEMBAHASAN

### Pelaksanaan Sistem *Electronic Budgeting* di Kelurahan Krendang Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta

Teori yang penulis gunakan untuk dikaitkan dengan fenomenan yang telah diamati dan di kaji adalah teori Implementasi George C. Edward III yang telah dianalisis untuk ditentukan dimensi dan indikator yang berkaitan dengan fenomena tersebut ialah sebagai berikut.

### Komunikasi

Hal-hal yang memengaruhi dari komunikasi dalam hal ini bagaimana cara penyampaian informasi dan pemberian tugas yang dilakukan.

#### ► Komunikator

Komunikator sebagai kepala dari komunikasi di dalam suatu organisasi dalam hal ini Lurah Kelurahan Krendang, menyampaikan informasi mengenai *Electronic Budgeting* melalui rapat minggu yang telah dijadwalkan. Penyampaian informasi melalui rapat minggu yang dilakukan oleh Kelurahan Krendang sangat bermanfaat untuk proses pelaksanaan Sistem *Electronic Budgeting* karena kegiatan ini dapat menjadi media informasi dari lurah kepada seluruh pegawai dalam proses pelaksanaan tugasnya.

Rapat mingguan yang telah dilakukan sebagai bentuk dari evaluasi kinerja terhadap para perangkat Kelurahan. Evaluasi ini dilakukan Lurah sebagai pimpinan pada Kelurahan Krendang untuk mempertegas dan memperjelas tugas dan fungsi masing-masing bagian. Dengan demikian diharapkan kinerja seluruh pegawai dapat memenuhi target

penyelesaian penginputan komponen *Electronic Budgeting* sesuai dengan yang ditetapkan pimpinan.

### ► **Komunikasikan**

Selain Lurah sebagai Kepala dari Kelurahan atau Komunikator, terdapat Bendahara dan Kepala Seksi Perekonomian yang memiliki tugas mengatur tentang DPA-RKA. Selain itu Kepala Seksi Perekonomian juga bertanggung jawab sebagai komunikasikan dalam komunikasi Pelaksanaan *Electronic Budgeting*.

Penyampaian informasi yang diberikan oleh lurah sebagai pimpinan telah diterima dengan baik oleh para pegawai. Hal ini terlihat dari kinerja para pegawai Kelurahan Krendang yang sangat baik. Setiap bagian telah menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai peraturan yang berlaku.

### ► **Media**

Dalam penyampaian informasi yang telah ditetapkan oleh undang-undang, komunikator dan komunikasikan melaksanakan rapat mingguan untuk memberikan informasi atau arahan mengenai pelaksanaan *Electronic Budgeting*. Setelah rapat melalui rapat

mingguan yang telah dilaksanakan rutin oleh Kelurahan maka perencanaan yang dilakukan oleh kelurahan akan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau BPKAD Provinsi DKI Jakarta. Adapun inventaris Kelurahan Krendang yang digunakan sebagai penunjang pelaksanaan *Electronic Budgeting* sebagai berikut.

Dari hasil pengamatan menunjukkan bahwa Inventaris penunjang *Electronic Budgeting* tergolong cukup baik namun masih terdapat kekurangan, contohnya ruangan, kursi, dan meja tempat PC diletakkan memang masih layak untuk digunakan namun tingkat kenyamanannya masih sangat kurang terlebih ruangan yang cukup sempit untuk digunakan pegawai mungkin dapat memengaruhi sedikit kinerja pegawai Kelurahan. Kemudian *WiFi* modem yang digunakan sudah baik namun Modem yang digunakan oleh Kelurahan Krendang sempat mendapat masalah pada jaringannya (*offline*) disebabkan karena adanya kerusakan pada kabel penyambung jaringan. Penanganan dari pihak Telkom cukup lambat yang mengakibatkan terganggunya proses pelaksanaan *Electronic Budgeting*.

**Tabel 2**

Inventaris Penunjang *Electronic Budgeting*

No	Inventaris	Jumlah	Keterangan
1	PC Acer	2	Spek: Cukup Baik Processor Core i5, Ram 4 GB, Kapasitas 1.25 TB, <i>Windows 8 Genuine</i>
2	Wi Fi Modem	2	Kualitas: Cukup Baik
3	Meja	2	Kualitas: Cukup baik
4	Kursi	2	Kualitas: Cukup Baik

**Sumber:** Kartu Inventaris Barang Kelurahan Krendang 2016

## Sumber Daya

### ► Sumber Daya Manusia

Sumber daya Manusia dalam Implementasi *Electronic Budgeting* di Kelurahan Krendang khususnya dalam penginputan data hanya bisa dilakukan oleh seorang pegawai. Dalam segi kualitas, operator *Electronic Budgeting* di Kelurahan Krendang memang sudah baik namun dalam segi jumlah dirasa masih kurang memadai karena Kelurahan Krendang hanya memiliki seorang operator saja.

Sistem *Electronic Budgeting* memang cukup rumit dan sulit untuk dioperasikan oleh karena sumber daya manusia (operator) yang dibutuhkan harus memiliki kemampuan khususnya dalam bidang komputer dan keuangan. Selain itu dibutuhkan pendidikan dan pelatihan untuk para operator mengenai tata cara pelaksanaan Sistem *Electronic Budgeting*. Pendidikan dan pelatihan tersebut di selenggarakan oleh BPKAD yang mengundang perwakilan dari masing-masing SKPD/UKPD.

Pendidikan, pelatihan dan sosialisasi terkait Sistem *Electronic Budgeting* yang telah dilaksanakan BPKAD telah didapatkan oleh pelaksana *Electronic Budgeting* di Kelurahan Krendang. Hal ini menyimpulkan bahwa dalam mengimplementasi Sistem *Electronic Budgeting* Kelurahan Krendang memang telah memiliki operator yang sangat berkualitas namun jumlah operator yang dapat melaksanakan sistem *Electronic Budgeting* yang dimiliki oleh Kelurahan Krendang hanya satu orang. Hal ini kemungkinan dapat menjadi kendala bagi pelaksanaan sistem *Electronic Budgeting* mengingat terbatasnya sumber daya manusia yang dimiliki Kelurahan Krendang dalam pelaksanaan sistem *Electronic Budgeting*.

### ► Wewenang

Kewenangan yang dimaksud dalam hal ini adalah kewenangan Lurah selaku Kepala Kelurahan dalam mengelola sumber daya khususnya dalam pelaksanaan *Electronic Budgeting*. Hal tersebut diperkuat dengan adanya Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 145 Tahun 2013 tentang Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Melalui *Electronic Budgeting*. Dapat dilihat dalam Peraturan Gubernur tersebut lurah memiliki wewenang untuk mengelola atau memberi kewenangan bagi pihak urusan keuangan dalam mengurus keuangan dengan sistem *Electronic Budgeting*.

Kewenangan lurah tersebut juga tertera pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 147 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan yang sebelumnya juga menjelaskan tentang tupoksi pegawai termasuk Lurah dan Kepala Seksi Perekonomian.

Proses pengambilan keputusan dalam proses penginputan komponen menggunakan sistem *Electronic Budgeting* dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan para perangkat kelurahan. Jika permasalahan mengenai Kelurahan yang terkait dan keputusan terkait masalah yang lebih kompleks di luar tugas, pokok dan fungsi Lurah bisa meminta petunjuk kepada Kepala BPKAD untuk pengambilan keputusan yang tepat dan sesuai.

### ► Fasilitas

Fasilitas merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kualitas kinerja para pegawai khususnya pada Kelurahan Krendang. Kondisi Kantor Kelurahan Krendang memang belum memenuhi standar dari gedung Kelurahan yang ada di

Provinsi DKI Jakarta. Kondisi ruangan yang terdapat pada Kantor Kelurahan Krendang juga sangat terbatas, hal ini menimbulkan suasana ruangan yang terlihat sangat padat. Selain itu pada kondisi Jakarta yang suhunya cukup panas, ruangan tempat penginputan data *Electronic Budgeting* tidak dilengkapi oleh peneddingin udara, hal ini tentunya memengaruhi tingkat kenyamanan khususnya operator pelaksana *Electronic Budgeting*.

## Disposisi

### ► Motivasi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memberikan motivasi kepada para pegawainya agar dapat meningkatkan kinerjanya melalui Tunjangan Kinerja Daerah. Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 207 Tahun 2014 tentang Penetapan Tunjangan Kinerja Daerah dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 193 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Daerah, para pegawai termasuk Lurah dan Bendahara menerima tunjangan dinamis atas segala apa yang telah dilaksanakan dengan bobot dari masing-masing tugasnya.

Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 214 Tahun 2014 tentang Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil juga dapat memengaruhi bagaimana motivasi seorang pegawai yang mengharuskan pegawai untuk memaksimalkan kinerja agar tidak diturunkan jabatannya. Kemudian berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 202 Tahun 2015 tentang Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Sipil Berprestasi menunjang motivasi sebagai sisi *Reward* kepada pegawai untuk menerima hadiah dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan hal-hal di atas dapat disimpulkan, motivasi para pegawai sudah tergolong baik, dikarenakan tunjangan yang merupakan sebuah kebutuhan dari setiap pegawai. Dilain pihak ancaman bagi kinerja pegawai yang kurang baik dipaksa untuk dapat motivasi diri para pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

## Struktur Organisasi

### ► Struktur Organisasi

Struktur Organisasi memengaruhi dalam sebuah pelaksanaan dikarenakan dalam organisasi atau dalam hal ini adalah Kelurahan, Lurah Krendang selaku pimpinan dalam organisasi membagi setiap tugas dari para pegawai-pegawai yang menyesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi. Selain itu Lurah juga memperhatikan kemampuan, kompetensi dan latar belakang pendidikan yang telah dimiliki oleh tiap-tiap pegawai.

Berdasarkan Struktur Organisasi yang bersumber dari Laporan bulanan Kelurahan Krendang yang telah dipaparkan sebelumnya, Kelurahan Krendang telah memiliki susunan organisasi yang sangat baik. Hal ini dapat dilihat pada gambar 4.2, bahwa semua jabatan yang ada di Kelurahan Krendang telah diisi oleh seluruh pegawai dan tidak ada pegawai yang merangkap jabatan, hal ini tentu sangatlah baik karena masing-masing bagian dapat dengan fokus menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

Struktur Organisasi dalam Kelurahan Krendang telah tersusun berdasarkan kemampuan dan kompetensi dari setiap pegawai dikarenakan pada Provinsi DKI Jakarta melaksanakan sistem lelang dalam penentuan jabatan seorang pegawai yang didasari dengan Peraturan Gubernur Nomor 145 Tahun 2014 tentang Seleksi

Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi.

Pemilihan jabatan dengan lelang dapat menentukan posisi jabatan terbaik untuk seorang pegawai yang mengikuti lelang tersebut. Posisi jabatan yang diterima seorang pegawai telah disesuaikan dengan kemampuan beserta pengalaman dari para pegawai yang mengikuti lelang jabatan tersebut. Hal ini dilakukan agar kinerja para pegawai mendapatkan hasil yang maksimal karena kemampuan serta pengalaman yang dimiliki sesuai dengan tugas dan fungsinya pada jabatan tersebut. Kinerja yang maksimal tersebut bertujuan agar dalam urusan pemerintahan para pegawai dapat melayani masyarakat dengan baik.

#### ► **Penyesuaian Standar Operasional Prosedur**

Dalam SOP implementasi dari sistem *Electronic Budgeting*, sudah menyesuaikan dengan Peraturan Gubernur Nomor 145 Tahun 2013 tentang Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/ Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Melalui *Electronic Budgeting* Pasal (3), yang mengharuskan untuk mengikuti segala tata cara Implementasi *Electronic Budgeting* sesuai dengan hal tersebut.

Dalam implementasi *Electronic Budgeting* telah disempurnakan kembali dalam Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2014 tentang Penyempurnaan Data *Component* dalam *Electronic Budgeting* untuk melaksanakan penyempurnaan data *Electronic Component* dalam *Electronic Budgeting* dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui *Electronic Budgeting*.

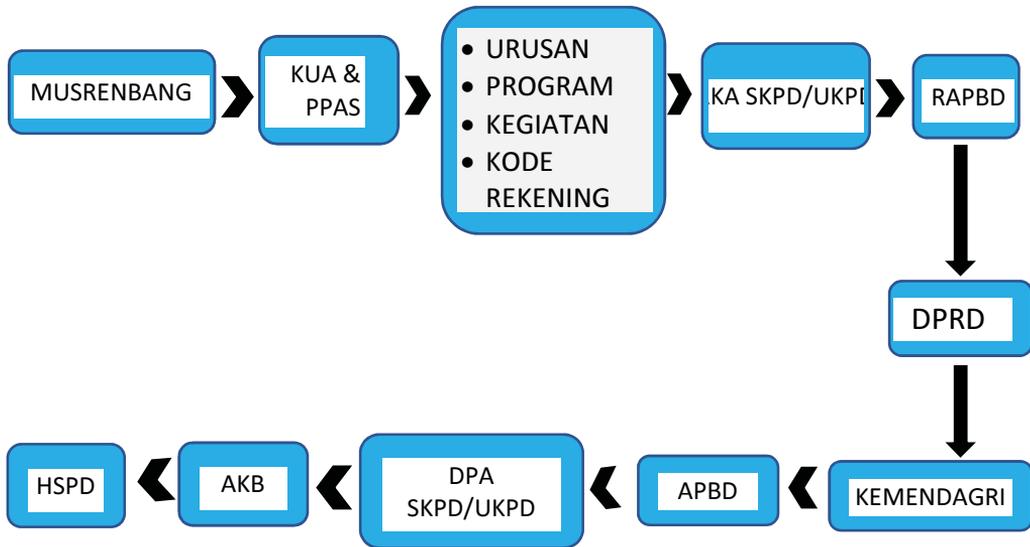
Berdasarkan siklus APBD, sistem penyusunan anggaran menggunakan

*Electronic Budgeting* masuk ke dalam tahap penyusunan, sedangkan penggunaan sistem pengelolaan keuangan berbasis SIPKD pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dilaksanakan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) yaitu BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) masih digunakan tetapi pada tahap yang lain yaitu penetapan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan. Peraturan Gubernur Nomor 145 Tahun 2013 tentang Penyusunan Rancangan APBD/APBD Perubahan Melalui *Electronic Budgeting*, variabel yang mendukung *Electronic Budgeting*, terdiri dari:

- a. Urusan;
- b. Program;
- c. Kegiatan;
- d. Sub Kegiatan;
- e. Kelompok Belanja;
- f. Kode Rekening;
- g. Komponen.

Variabel yang mendukung terlaksananya pelaksanaan sistem *Electronic Budgeting* ini merupakan terdiri dari 7 bagian, ketujuh bagian ini dibagi antara kewenangan BPKAD, BAPPEDA dan SKPD/UKPD dan Kelurahan dalam hal ini merupakan Kelurahan Krendang. Proses penginputannya berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 145 Tahun 2013 tentang Penyusunan Rancangan APBD/APBD Perubahan Melalui *Electronic Budgeting*.

SKPD/UKPD dapat melihat rincian komponen yang diinginkan dengan cara memilih kode kelompok barang atau melakukan pencarian dengan mengisikan nama atau kode barang. Jika SKPD/UKPD ingin melihat rincian komponen berdasarkan kelompok barang, maka memilih masing-masing kelompok barang sesuai dengan kebutuhan.



**Gambar 2**

Proses Pengelolaan Keuangan Daerah Menggunakan *Electronic Budgeting*

**Sumber:** Kelurahan Krendang

Proses pengelolaan keuangan daerah pada tahap perencanaan anggaran sampai dengan penetapan anggaran menggunakan sistem *Electronic Budgeting* pada Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta seperti tampak pada gambar 2 di atas..

Pada tahap perencanaan, SKPD/UKPD dan Kelurahan sebagai Pengguna Anggaran dan Kepala atau Ketua daripada SKPD/UKPD dan Lurah tersebut selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerah, sesuai dengan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

### **Hambatan dalam Pelaksanaan Sistem *Electronic Budgeting* di Kelurahan Krendang Kota Administrasi Jakarta Barat**

Faktor penghambat dalam pelaksanaan *Electronic Budgeting* di Kelurahan Krendang Kota Administrasi Jakarta Barat adalah Kuantitas dan Kualitas (kompetensi

Aparatur) Sumber daya aparatur, serta ketersediaan sarana dan prasarana di lingkungan Kelurahan Krendang khususnya dalam penunjang sistem *Electronic Budgeting*.

Berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis yang menjadi faktor penghambat dari Implementasi Sistem *Electronic Budgeting* di Kelurahan Krendang Kota Administrasi Jakarta Barat adalah sebagai berikut.

1. Program atau perangkat lunak (software) *Electronic Budgeting* yang cukup sulit dioperasikan
2. Situs atau *Website Sistem Electronic Budgeting* terkadang sulit untuk diakses atau tidak dapat memasuki *Website* ini.
3. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur untuk menjalankan Sistem *Electronic Budgeting* ini masih belum memadai..
4. Masalah Jaringan Internet untuk mengakses Sistem *Electronic Budgeting*.

## Upaya yang Dilakukan Kelurahan Krendang dalam Sistem *Electronic Budgeting* di Kelurahan Krendang Kota Administrasi Jakarta Barat

Pengelolaan keuangan daerah dengan menggunakan Sistem *Electronic Budgeting* merupakan pengelolaan yang berbasis online di mana setiap SKPD/UKPD yang harus terlebih dahulu terhubung dengan jaringan internet. Masing-masing SKPD/UKPD yang telah terhubung ke dalam jaringan internet kemudian dapat mengakses aplikasi *Electronic Budgeting* yang telah terhubung langsung kepada server pusat, dalam hal ini yaitu BPKD sebagai BUD Provinsi DKI Jakarta.

Sistem yang digunakan tersebut bukan merupakan suatu sistem yang mudah untuk dijalankan, melainkan butuh beberapa keahlian serta pengalaman dan pemahaman yang mendalam untuk mengoperasikan sistem *Electronic Budgeting*. Dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dialami tersebut pihak Kelurahan Krendang melaksanakan upaya dalam memecahkan masalah tersebut. Beberapa cara yang dilakukan dalam upaya menangani hambatan tersebut, yaitu sebagai berikut.

1. Permasalahan mengenai Perangkat Lunak (*software*) *Electronic Budgeting* yang sulit dioperasikan.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah ini yaitu dengan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada operator pelaksana *Electronic Budgeting* di masing-masing SKPD/UKPD dalam hal ini terkhusus di Kelurahan Krendang. Pendidikan dan pelatihan ini diselenggarakan Oleh ketua BPKAD Provinsi DKI Jakarta. Pendidikan dan Pelatihan biasa diberikan secara

intensif agar nantinya para operator dapat lebih berkompeten dalam pengoperasian *Electronic Budgeting*. Selain itu pendidikan dan pelatihan diberikan bila terjadi perubahan-perubahan (*upgrade*) dalam sistem *Electronic Budgeting* itu sendiri. Hal ini dilakukan agar setiap operator dapat mengikuti perubahan-perubahan tersebut dan menghindari terjadinya kesalahan dalam pengoperasian sistem *Electronic Budgeting*.

2. Permasalahan mengenai Situs atau *Website Sistem Electronic Budgeting* terkadang sulit untuk diakses atau tidak dapat memasuki *Website* ini.

Untuk memecahkan masalah ini maka yang dilakukan pihak kelurahan dalam hal ini yaitu pegawai pelaksana *Sistem Electronic Budgeting* di Kelurahan Krendang yaitu mendatangi langsung ke BPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Provinsi DKI Jakarta untuk melaporkan data anggaran dan berkonsultasi kepada penyelia masing-masing SKPD/UKPD yang telah ditunjuk. Selain itu untuk menangani kendala lambatnya atau sulitnya sistem ini diakses, pihak BPKAD melakukan pembagian jadwal dalam penginputan pada setiap SKPD/UKPD hal ini bertujuan mengurangi kepadatan pada sistem yang mengakibatkan sistem *Electronic Budgeting* mengalami masalah ataupun gangguan sehingga sulit untuk diakses.

3. Permasalahan mengenai kualitas dan kuatitas Sumber Daya Aparatur untuk menjalankan Sistem *Electronic Budgeting* ini masih belum memadai.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah ini yaitu dengan memberikan

pendidikan dan pelatihan kepada operator pelaksana *Electronic Budgeting* di masing-masing SKPD/UKPD dalam hal ini terkhusus di Kelurahan Krendang. Pendidikan dan pelatihan ini diselenggarakan oleh Ketua BPKAD Provinsi DKI Jakarta. Pendidikan dan Pelatihan biasa diberikan secara intensif agar nantinya para operator dapat lebih berkompeten dalam pengoperasian *Electronic Budgeting*. Selain itu pendidikan dan pelatihan diberikan bila terjadi perubahan-perubahan (*upgrade*) dalam sistem *Electronic Budgeting* itu sendiri. Hal ini dilakukan agar setiap operator dapat mengikuti perubahan-perubahan tersebut dan menghindari terjadinya kesalahan dalam pengoperasian sistem *Electronic Budgeting*.

4. Permasalahan Jaringan Internet untuk mengakses Sistem *Electronic Budgeting*

Upaya yang dilakukan Kepala Bidang Anggaran dalam mengatasi masalah ini adalah pertama, melakukan pengerjaan input anggaran pada malam/pagi hari di mana posisi dari pada jaringan internet tidak dalam keadaan sibuk dan data akan cepat masuk ke sever. Upaya ini dilakukan apabila masalah dalam jaringan internet terganggu yang mengakibatkan kapasitas kecepatan internet menjadi berkurang. Kedua, apabila terjadi putus jaringan internet akibat adanya kerusakanan, maka Kelurahan Krendang telah menyiapkan modem khusus untuk komputer yang digunakan dalam pelaksanaan *Electronic Budgeting*. Hal ini telah dipersiapkan mengingat waktu penginputan data yang di berikan Pemerintah DKI Jakarta sangatlah terbatas.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan di Kelurahan Krendang Kota Administrasi Jakarta Barat, maka dapat ditarik beberapa simpulan yaitu sebagai berikut.

1. Pada Pelaksanaan Sistem *Electronic Budgeting* di Provinsi DKI Jakarta khususnyadi Kelurahan Krendang masih kurang maksimal hal ini dikarenakan masih ditemuinya beberapa masalah dalam pelaksanaan Sistem *Electronic Budgeting* di Kelurahan Krendang yang mengakibatkan proses pengelolaan keuangan terhambat.
2. Hambatan yang dihadapi dalam Implementasi sistem *Electronic Budgeting* pada Kelurahan Krendang adalah sebagai berikut.
  - a. Perangkat lunak (*software*) *Electronic Budgeting* yang cukup sulit dan rumit untuk dioperasikan, hal ini karena Sistem *Electronic Budgeting* adalah pengelolaan keuangan secara elektronik hal ini mengharuskan pelaksananya (operator) menguasai tentang komputerisasi.
  - b. Situs atau *website* sistem *Electronic Budgeting* terkadang sulit untuk diakses atau tidak dapat memasuki Situs atau *Website* hal ini terjadi karena adanya kerusakan pada server pusat sistem *Electronic Budgeting*.
  - c. Jumlah pegawai Kelurahan Krendang yang dapat mengoperasikan sistem *Electronic Budgeting* sangat sedikit jumlahnya. Hal ini tentu akan berdampak buruk apabila pegawai pengoperasi (operator)

*Electronic Budgeting* berhalangan hadir, karena dapat menghambat proses penginputan data mengingat di Kelurahan Krendang hanya terdapat dua orang operator yang dapat mengoperasikan sistem *Electronic Budgeting* tersebut.

- d. Jaringan Internet untuk mengakses Sistem *Electronic Budgeting* terkadang mengalami masalah seperti lambatnya koneksi atau terputusnya koneksi, hal ini mengakibatkan proses penginputan data Kelurahan Krendang terlambat.
3. Upaya yang dilakukan Kelurahan Krendang sebagai berikut.
- a. Memberikan pelatihan yang intensif kepada para pegawai terkhusus kepada pelaksana *Electronic Budgeting* melalui diklat mengenai pengelolaan keuangan dan pengoperasian Sistem *Electronic Budgeting*. Pelatihan juga diberikan bila terjadi perubahan atau penambahan aplikasi dalam Sistem *Electronic Budgeting*.
  - b. Melakukan koordinasi langsung antara Operator pelaksana dengan staf Bidang Anggaran pada BPKAD Provinsi DKI Jakarta serta melakukan konsultasi mengenai *Electronic Budgeting*, jika mengalami kesulitan atau masalah dalam proses pekerjaan.
  - c. Penginputan data dilakukan sesuai jadwal agar tidak jadi kepadatan pada server yang mengakibatkan terganggunya Situs atau Website Sistem *Electronic Budgeting*. Penginputan secara terjadwal tersebut dapat mengurangi masalah pada situs atau *website Electronic Budgeting*.

- d. Perekrutan kembali pegawai yang mempunyai kemampuan memadai di bidang koputerisasi serta pengelolaan keuangan agar jumlah operator yang dimiliki Kelurahan Krendang bertambah
- e. Melakukan penginputan data *Electronic Budgeting* pada malam hari dan/atau menggunakan modem yang telah disediakan khusus untuk pelaksanaan penginputan *Electronic Budgeting* bila jaringan internet Kelurahan terputus hal ini guna meminimalisir kemungkinan keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

## Saran

Berdasarkan simpulan yang diuraikan di atas, dengan segala keterbatasan penulis mencoba untuk memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan *Electronic Budgeting* seperti komputer dan jaringan internet haruslah diperbaharui karena sarana dan prasarana yang ada di Kelurahan Krendang kualitasnya sudah kurang baik dan sering mengalami gangguan. Melihat sistem ini merupakan sistem yang canggih jadi diperlukan sarana dan prasana yang dapat menunjang sistem tersebut agar dalam proses pelaksanaannya dapat berjalan lebih baik khususnya di Kelurahan Krendang.
2. Dalam pelaksanaan dan pengoperasian *Electronic Budgeting* harus berpedoman dengan modul-modul yang telah ada, karena modul tersebut akan membantu dalam hal penginputan komponen. Mengabaikan modul-modul tersebut dapat berakibat buruk dalam pengelolaan keuangannya.

3. Dalam hal perekrutan pegawai, seperti yang kita ketahui memerlukan waktu dan proses yang lama dan penambahan pegawai juga tidak selamanya menjadi solusi terbaik. Namunakan lebih baik apabila dengan cara mengefektifkan dan mengoptimalkan Sumber Daya Manusia yang ada, melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan yang lebih intensif untuk mewujudkan keterampilan dan kemahiran. Segala sesuatu yang dibuat oleh manusia kodratnya tentu banyak memiliki kesalahan dan kelemahan, Sebagaimana dalam pelaksanaan *Electronic Budgeting* ini, masih terjadi kesalahan yang dibuat. Untuk itu sikap cepat dan tanggap terhadap permasalahan yang timbul perlu di tingkatkan dengan cara membuat suatu kebijakan dalam pemecahan masalah tersebut.
4. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu mengadakan pendidikan dan pelatihan teknis fungsional kepada daerah lain yang ingin menggunakan sistem *Electronic Budgeting* ini di daerahnya karena jelas baik dan sangat efektif dalam penyusunan anggaran instansi pemerintah pada tata kelola keuangan daerah.
5. Untuk manfaat yang akan lebih dirasakan masyarakat, diharapkan tidak hanya pejabat tertentu yang bisa mengakses situs *Electronic Budgeting*, transparansi juga perlu dilakukan agar masyarakat mengetahui bagaimana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengelola anggaran yang dimiliki untuk kemaslahatan publik.
6. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu dikembangkan melalui penelitian selanjutnya mengenai konsep pengelolaan

keuangan daerah berbasis sistem informasi *Electronic Budgeting* untuk mendukung terciptanya *Good Governance*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Revisi 2010*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Bogdan, Robert C. 1982. *Qualitative Research For Education an Introduction to Theory and Methods*. Boston London.
- Creswell, John W. 2013. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed Edisi Ketiga*. Yogyakarta: Pusaka Pelajar.
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. New York: Congressional Quarterly Press.
- Esterberg, Kristin G. 2002. *Qualitative Methods in Social Research*. New York: Mc Graw Hill.
- Harry, Suharman, 2006. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan: Pengaruh Alat Evaluatif-Anggaran, Anggaran Pasrtisipatif*. Bandung: PAAP UNPAD.
- Mardalis. 2009. *Metode penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Askara.
- Mulyanto, Agus. 2009. *Sistem Informasi Konsep dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Moleong, Lexy. J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi. 2010. *Sistem Akuntansi, Edisi ke-3, Cetakan ke-5*. Jakarta: Salemba Empat.
- Munandar, M. 2007. *Budgeting Perencanaan Kerja Pengkordinasian Kerja Pengawasan Kerja*. Yogyakarta: BPFE Universitas Gajah Mada.

- Nazir, Mohammad. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT. Refika Aditama
- Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfa Beta.
- Susanto, Azhar. 2013. *Sistem Informasi Akuntansi*. Bandung: Lingga Jaya
- Sutarman. 2009. *Pengantar Teknologi Informasi*. Yogyakarta: Bumi Aksara.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah*
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang *Keuangan Daerah*
- Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang *Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 145 Tahun 2013 tentang *Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan melalui Electronic Budgeting*.

Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 423.6 - 351 Tahun 2015 tentang *Pedoman Penulisan dan Mekanisme Ujian Laporan Akhir serta Skripsi Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun Akademik 2016/2017*

### **Lain-Lain**

- <http://www.jakarta.go.id>
- <http://kbbi.web.id>
- <http://mulyoNo.staff.uns.ac.id>
- <http://www.slideshare.net>
- <https://ppidkemkominfo.files.wordpress.com>
- <http://www.sarjanaku.com>
- Evaluasi dan Masukan Implementasi Electronic Budgeting Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015